BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Eksploitasi
Edisi : 24 Juni 2008
Halaman : 13

# Stop Eksploitasi Papua
# 65 Perusahaan Mendapat Konsesi 14,4 Juta Hektar

Jakarta, Kompas - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan lembaga masyarakat adat Papua mempertanyakan manfaat langsung eksploitasi hutan di sana. Bahkan, mereka menyerukan penghentian eksploitasi hutan.

Eksploitasi itu meliputi konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit maupun HPH. ”Puluhan tahun hutan adat kami dieksploitasi, namun tak memberi kesejahteraan kepada warga kami,” kata Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Jhohanis Gifelem dalam seminar ”Selamatkan Manusia dan Hutan Papua” yang diadakan Perkumpulan Telapak di Jakarta, Senin (23/6). Pertemuan diadakan selama dua hari dan diharapkan tersusun rekomendasi kebijakan sebagai masukan pembangunan Papua.

Di wilayah adat Malamoi, setidaknya ada dua perkebunan kelapa sawit selain eksploitasi kayu. Kini hutan alam, yang secara turun-temurun menjadi sumber kehidupan, telah menjadi sumber petaka, yakni banjir dan longsor. Karena itu, mereka meminta pemerintah mencabut izin penebangan kayu dan perkebunan kelapa sawit. Mereka meminta pendampingan pengelolaan hutan secara mandiri. Permintaan serupa dikatakan Ketua LMA Biak Mananuir Yan Pieter Yarangga. Di Biak, hutan dibuka sejak masa Belanda hingga sekarang.

”Daya dukung hutan sudah terlewati sehingga kami membutuhkan sikap tegas pemerintah menghentikan pembukaan hutan,” ujarnya. Dia mengatakan, masuknya investasi skala besar di Papua telah merusak struktur masyarakat adat dan cara pandang mereka terhadap hutan.

Sebagian besar warga asli Papua, yang masih melakukan budaya meramu, membutuhkan pendampingan khusus. ”Jangan bicara manis-manis, tetapi pembantaian jalan terus,” kata Yarangga.

**Terus dibuka**

Dari data Forum Kerja Sama (Foker) LSM Papua tahun 2006, ada 65 perusahaan HPH di Papua dengan luas konsesi 14,4 juta hektar (ha). Namun, hanya 15 HPH yang masih aktif.

Dari data Dinas Kehutanan Provinsi Papua, luas kawasan hutan dan perairan Papua 40,4 juta ha, 9,8 juta ha di antaranya hutan lindung. Hutan Papua dibagi menjadi tujuh zona industri perkayuan, rata-rata produksi diproyeksikan sekitar 1 juta m>sup<3>res<>res< per tahun. Izin pertambangan 4,93 juta ha dikeluarkan di kawasan hutan lindung.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Data terakhir kependudukan Papua menunjukkan, sebanyak 391.767 keluarga (81 persen) dari total 480.578 keluarga di Papua tergolong miskin. ”Data ini menunjukkan bagaimana dampak eksploitasi sumber daya alam Papua bagi warganya,” kata Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua Septer Manufandu.

Sekitar 4 juta ha lahan telah disiapkan bagi belasan perusahaan perkebunan skala besar, 300.000 ha di antaranya kebun kelapa sawit.

Pengampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, mengatakan, ancaman keutuhan hutan Papua bukan hanya dari pengambilan kayu dan kelapa sawit, namun juga rencana pembukaan jalan raya dengan pamrih kayu dan pemekaran daerah.

”Kami meneliti bahwa 2.500 kilometer jalur trans-Papua Barat yang akan dibangun itu melintasi kawasan merbau. Itu memang tukar kayu,” kata Bustar. (GSA)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Anda mengaku, pihaknya sangat ingin sebagian besar warga di Kabupaten Tangerang menikmati air bersih. Apalagi, pemerintah pusat meminta kepada seluruh daerah untuk mampu melayani 80 persen masyarakatnya dalam kebutuhan air bersih.

"Ini tantangan berat bagi kami untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 80 persen masyarakat dari jumlah penduduk ini yang harus tercapai pada 2015," kata Anda Suhanda.

**Libatkan Swasta**

Lebih jauh Juru Bicara PDAM TKR, Anda Suhanda mengakui, sangat dibutuhkan peran swasta untuk dilibatkan dalam pengelolaan air bersih. Karena PDAM sendiri kesulitan memenuhi permintaan masyarakat akan air bersih. "Sangat diperlukan keterlibatan swasta dalam pengelolaan air bersih," kata Anda.

Dengan kondisi tersebut, kalangan DPRD Kabupaten Tangerang pesimis dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni hingga tahun 2015 setidaknya 80 persen masyarakat di Kabupaten Tangerang harus sudah dapat menikmati air bersih.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Tangerang, Achmad Kurtubi Su'ud mengatakan, jika melihat jumlah pelanggan yang dimiliki oleh PDAM TKR memang sangat timpang karena lebih banyak didominasi oleh warga di wilayah Kota Tangerang. "Seharusnya PDAM TKR harus lebih optimal dalam melayani kebutuhan air bersih untuk daerahnya sendiri yakni di Kabupaten Tangerang. Sekarang ini kan lebih banyak pelanggannya dari Kota Tangerang," papar Kurtubi.

Kurtubi menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang harus menunjukkan upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap air bersih. "Sekarang ini banyak air resapan yang sudah tidak sehat, akibatnya akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Nanang Komara mengatakan, kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan air bersih ini tak akan mengganggu keberadaan perusahaan air milik Pemkab Tangerang. [SP/Dewi Gustiana]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup